

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konseptual tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah Sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga Masyarakatnya (Adi Fahrudin, 2012:9).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial: Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai “upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.” (PP RI Nomor 39 Tahun & 2012, 2022).

Fahrudin memberikan pengertian kesejahteraan sosial menurut Friedlander (1980), yaitu:

Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop their full capacities and

to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.

Kesejahteraan sosial dikenal sebagai sistem layanan dan institusi sosial yang terorganisir, yang membantu individu dan kelompok mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka secara penuh dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Fahrudin memberikan pengertian kesejahteraan sosial menurut UU No. 6 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Lansia terlantar merupakan kelompok yang mengalami penurunan, bahkan kehilangan kemampuan untuk berfungsi secara sosial, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menjalin hubungan sosial, maupun menjalankan peran sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung menjadi bagian penting dari upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memulihkan, menjaga, dan meningkatkan kemampuan lansia terlantar agar dapat kembali berfungsi secara sosial.

Disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan keberfungsian sosial merupakan konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini berfokus pada pembahasan utama mengenai bagaimana proses rehabilitasi sosial dilaksanakan sebagai bagian dari upaya kesejahteraan sosial

untuk membantu lansia terlantar agar kembali mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Fahrudin (2014: 10-12) memberikan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu mencerminkan semua program kesejahteraan sosial menurut Schneiderman (1972), yaitu:

1. Pemeliharaan Sistem, Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal seperti definisi tujuan hidup; dorongan untuk terus hidup individu dan kelompok; norma-norma yang mengatur peran yang dimainkan oleh anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan pria dan wanita; norma-norma dalam produksi dan distribusi barang dan jasa; dan penyelesaian konflik sosial.
2. Pengawasan Sistem, Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Untuk mencapai tujuan ini, kegiatan kesejahteraan sosial termasuk meningkatkan fungsi-fungsi pemeliharaan seperti kompensasi dan (re)sosialisasi serta meningkatkan kemampuan untuk mengakses fasilitas yang tersedia bagi kelompok masyarakat yang menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai, seperti kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat.

3. Perubahan Sistem, Dalam membuat perubahan itu, tujuan dari sistem kesejahteraan sosial adalah untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dan adil dalam pengambilan keputusan, untuk menggunakan struktur kesempatan yang tersedia bagi mereka, dan untuk mendistribusikan sumber daya dengan cara yang lebih adil dan merata.

Tujuan kesejahteraan sosial menurut Zastrow adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar individu dan meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat secara menyeluruh. Zastrow menyatakan bahwa, *“The goal of social welfare is to fulfill the social, health, and recreational requirements of all individuals in a society. Social welfare seeks to enhance the social functioning of all age groups, both rich and poor. When other institutions in our society, such as the market economy and the family, fail at times to meet the basic needs of individuals or groups of people, then social services are needed and demanded”* (Zastrow, 2004), yang dapat diterjemahkan bahwa tujuan kesejahteraan sosial adalah memenuhi kebutuhan sosial, kesehatan, dan rekreasi seluruh individu dalam masyarakat, serta meningkatkan keberfungsian sosial semua kelompok usia tanpa membedakan status ekonomi; dan ketika institusi lain seperti ekonomi pasar maupun keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar individu atau kelompok tertentu, maka layanan sosial menjadi diperlukan dan dituntut keberadaannya.

Kesejahteraan, menurut Zastrow (2004), adalah memenuhi kebutuhan sosial, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan rekreasi setiap anggota masyarakat. Menurut Haryanto dan Tomagola (1997), setiap orang memiliki kebutuhan dasar (basic needs), yang terbagi menjadi kategori seperti makanan, pakaian, papan, dan kesehatan. (Setiawan, 2017)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.

3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial : Pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Adi Fahrudin dalam Buku Pengantar Kesejahteraan Sosial membahas bahwa fungsi – fungsi kesejahteraan sosial adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya, yang mencakup fungsi penyembuhan (curative), pencegahan (preventive), pengembangan (developmental), dan penunjang (supportive) :

1. Fungsi Penyembuhan (Curative), Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
2. Fungsi Pencegahan (Preventive), Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan Masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta Lembaga-lembaga sosial baru.
3. Fungsi Pengembangan (Development), Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses Pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (Supportive), Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain (Fahrudin (2014: 12-13)).

2.1.4 Komponen Komponen Kesejahteraan Sosial

Fahrudin (2014) memberikan penjelasan ciri-ciri tertentu dari usaha kesejahteraan sosial yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain, yaitu:

1. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi sosial yang formal. Karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan merupakan fungsi utamanya, kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan masyarakat.

2. Penandaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Pengumpulan dana dan sumber adalah tugas pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan kesejahteraan sosial tidak berfokus pada keuntungan semata-mata.

3. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Ini adalah perbedaan utama antara pelayanan kesejahteraan sosial dan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

4. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan prinsip ilmiah, terorganisir, sistematis, dan menggunakan metode dan teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5. Kebijakan/Perangkat Hukum

Perundang-undangan yang mengatur persyaratan untuk mendapatkan layanan, bagaimana layanan diberikan, dan kapan layanan diakhiri harus mendukung pelayanan kesejahteraan sosial.

6. Peran serta Masyarakat

Keberhasilan dan kebermanfaatan usaha kesejahteraan sosial bergantung pada keterlibatan partisipasi masyarakat.

7. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Bila tidak ada data dan informasi yang tepat, layanan kesejahteraan sosial tidak akan efektif atau tidak tepat sasaran.

2.2 Tinjauan Konseptual tentang Pekerjaan Sosial

2.2.1 Definisi Pekerjaan Sosial

Walter A. Friedlander dan Robert Z. Apte dalam bukunya yang berjudul *A Concepts and Methods of Social Work* mendefinisikan : “Pekerjaan sosial adalah suatu pelayanan profesional, yang prakteknya didasarkan pada pengetahuan dan

ketrampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok, dan masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan”.

Charles Zastrow mendefinisikan : Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai “kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan” (Sukoro, 1998).

Menurut Fahrudin memberikan definisi pekerjaan sosial menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW), yaitu:

Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or community to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Social work practice consists of the professional application of social work values, principles, and techniques to one or more of the following ends: helping people obtain tangible services; providing counseling and psychotherapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participating in relevant legislative processes. The practice of social work requires knowledge of human development and behavior; of social, economic, and cultural institutions; and of the interactions of all these factors.

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional dalam membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas mereka dalam keberfungsian sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari penerapan profesional nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial untuk satu atau lebih tujuan berikut: membantu orang memperoleh layanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga, dan kelompok; membantu masyarakat atau kelompok untuk menyediakan atau meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan. Praktik pekerjaan sosial membutuhkan pengetahuan tentang

perkembangan dan perilaku manusia; institusi sosial, ekonomi, dan budaya; serta interaksi dari semua faktor ini.

2.2.2 Pekerjaan Sosial sebagai Profesi

Ernest Greenwood menulis artikel tentang karakteristik profesi dalam tahun 1957. 1) Suatu profesi harus memiliki pengetahuan dasar dan mengembangkan teori sistematis yang mengarahkan ketrampilan-ketrampilan praktik persiapan pendidikan. 2) Profesi harus bersifat intelektual dan praktikal. 3) Pertimbangan dan kompetensi profesional menentukan kenyamanan dan kredibilitas dalam hubungan klien-tenaga profesional. Kekuatan pengaturan dan hak istimewa profesional diberikan oleh masyarakat. 4) Sebuah profesi memiliki kode etik yang dapat ditegakkan, jelas, dan sistematis yang memaksa pekerja berperilaku secara etis. 5) Suatu profesi dibimbing oleh nilai-nilai, standar, dan simbol budaya yang tertanam dalam jaringan organisasi yang terdiri dari kelompok formal dan informal, yang berfungsi sebagai saluran untuk profesi beroperasi dan melaksanakan fungsinya.

Lima kriteria tersebut, tampak bahwa karakteristik profesi telah menjadi karakteristik profesi pekerjaan sosial. Sebagai suatu profesi yang sedang berkembang di Indonesia, pekerjaan sosial harus memperoleh kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas kinerja pekerja sosial. Tanpa kepercayaan publik, sangat sulit untuk mengokohkan identitas profesi dalam masyarakat. Interaksi simbiosis antara kepercayaan publik dan pekerjaan sosial menentukan kekuatan dan eksistensi pekerjaan sosial. (Fahrudin, 2018)

2.2.3 Pekerjaan Sosial Lansia

Pekerjaan sosial lansia merupakan bentuk praktik profesional yang berfokus pada pendampingan dan pelayanan terhadap lanjut usia yang mengalami berbagai permasalahan sosial, ekonomi, kesehatan, maupun psikologis. Lansia sebagai individu yang berada pada tahap akhir siklus kehidupan sering menghadapi penurunan kondisi fisik, keterbatasan ekonomi, berkurangnya peran sosial, serta melemahnya dukungan keluarga dan lingkungan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan lansia berada dalam situasi rentan dan membutuhkan perhatian serta penanganan yang bersifat menyeluruh dan manusiawi (Fahrudin, 2012).

Konteks pekerjaan sosial, lansia dipandang sebagai individu yang tetap memiliki martabat, pengalaman hidup, serta potensi yang perlu dihargai dan dikembangkan. Oleh karena itu, praktik pekerjaan sosial lansia tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada upaya menjaga dan memulihkan keberfungsian sosial lansia agar tetap merasa dihargai, memiliki peran, dan mampu menjalani kehidupan secara bermakna sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip pekerjaan sosial yang menempatkan klien sebagai subjek yang memiliki hak, potensi, dan kapasitas untuk berkembang (Zastrow, 2010).

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam mendampingi lansia melalui berbagai tahapan pelayanan, mulai dari asesmen kebutuhan, perencanaan intervensi, pelaksanaan bimbingan sosial, hingga evaluasi dan tindak lanjut pelayanan. Proses

tersebut dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan lansia. (IFSW, 2014).

Pendekatan yang digunakan dalam pekerjaan sosial lansia menekankan pada hubungan yang empatik, komunikasi yang hangat, serta penghormatan terhadap pilihan dan kebutuhan lansia. Dengan pendekatan ini, lansia tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang dilibatkan secara aktif dalam proses pelayanan sosial (IFSW, 2014).

Pelaksanaan rehabilitasi sosial, pekerjaan sosial lansia bertujuan untuk membantu lansia mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi, memperkuat kembali hubungan sosial dengan lingkungan, serta meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan psikososial. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa pelayanan sosial, termasuk rehabilitasi sosial, diarahkan untuk membantu individu agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pekerja sosial diharapkan mampu membantu lansia terlantar untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih layak, bermartabat, dan berfungsi secara sosial sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki.

2.2.4 Tujuan Pekerjaan Sosial

Kegiatan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan seseorang, kelompok, atau masyarakat untuk berfungsi secara sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan ini dikenal sebagai pekerjaan sosial. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari penerapan

profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik pekerjaan sosial untuk mencapai salah satu atau lebih dari tujuan berikut: 1) memberi orang akses ke layanan kesehatan nyata; 2) memberikan konseling dan psikoterapi kepada individu, keluarga, dan kelompok; 3) membantu komunitas atau kelompok memberikan atau meningkatkan layanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses legislatif yang relevan (Fahrudin, 2018).

Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW), dalam Fahrudin, (2014 :66) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan individu untuk memecahkan masalah, mengatasi masalah, dan berkembang.
2. Menghubungkan individu dengan sistem-sistem yang menyediakan sumber, pelayanan, dan kesempatan.
3. Memperbaiki sistem-sistem yang memberikan sumber-sumber dan pelayanan kepada individu untuk bekerja lebih efisien dan manusiawi.
4. Memperbaiki dan mengembangkan kebijakan sosial.
5. Meningkatkan kesejahteraan manusia serta mengurangi kemiskinan, penindasan, dan jenis ketidakadilan sosial lainnya.
6. Meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi melalui advokasi dan tindakan sosial dan politik yang meningkatkan kebijakan, pelayanan, dan sumber daya.

7. Membangun dan menerapkan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung pekerjaan sosial.
8. Menciptakan dan menerapkan praktik dalam berbagai konteks budaya

Pekerjaan sosial juga dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas profesional dalam membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas masyarakat untuk berfungsi secara sosial. Tujuan dari pekerjaan sosial adalah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan sosial sebagai aktivitas profesional didasarkan pada 3 kerangka pengetahuan (*Body of Knowledge*), keahlian (*Body of Skill*), dan nilai (*Body of Value*) (Husna, 2014).

2.2.5 Peran dan Fungsi Pekerjaan Sosial

(Hilmawan & Hamid, 2024) memberikan penjelasan mengenai Fungsi pekerjaan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Zastrow yaitu:

1. Pemercepat Perubahan (Enabler), Membantu orang menemukan dan mengkomunikasikan kebutuhan mereka, menjelaskan masalah mereka, dan membangun kemampuan mereka untuk menangani masalah secara langsung.
2. Perantara (Broker), Membangun hubungan antara individu dan kelompok yang membutuhkan dan sumber daya masyarakat
3. Pendidik (Educator), pekerja komunitas diharapkan dapat mudah terserap oleh komunitas yang mereka usahakan untuk mengubah dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan konsep secara sederhana dan efektif. Namun demikian, dia harus

memiliki informasi yang baik tentang topik saat ini. Seorang pekerja komunitas biasanya harus berhubungan dengan rekan kerja dari berbagai bidang yang ahli di bidang mereka dalam hal ini.

4. Tenaga Ahli (Expert), Seorang ahli diyakini dapat memberikan saran – saran, dan dukungan informasi dalam berbagai bidang. Misalnya, seorang profesional sumber daya manusia harus mampu memberikan saran tentang bagaimana membangun struktur organisasi untuk organisasi nirlaba yang menangani masalah lingkungan, mengidentifikasi kelompok yang harus diwakili, atau memberikan rekomendasi tentang jenis masalah apa yang harus diwakili.
5. Perencana sosial (Social planner), Salah satu tugas seorang sosial planner adalah mengumpulkan informasi tentang masalah sosial, menilainya, dan membuat tindakan penanggulangan yang rasional. Zastrow berpendapat bahwa tugas utama seorang ahli pada dasarnya adalah membuat saran dan ide atau nasihat mengenai masalah dan kesulitan yang ada. Sementara itu, tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan program adalah fokus utama perencanaan sosial.
6. Advokat. Peran advokat dalam pekerjaan sosial merupakan bentuk tanggung jawab profesional pekerja sosial dalam memperjuangkan hak, kepentingan, dan kesejahteraan klien, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan, terpinggirkan, atau tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan kebutuhannya sendiri. Pekerja sosial bertindak sebagai pembela yang memastikan klien memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan sosial, perlindungan hukum, serta kebijakan yang berpihak pada kemanusiaan (Zastrow, 2017)

7. Aktivis (The activist), Sebagai aktivis, dia selalu membawa perubahan besar, dan seringkali tujuannya adalah memberikan kekuasaan atau sumber daya kepada kelompok sosial yang kurang beruntung. Dalam kebanyakan kasus, seorang aktivis mengambil sikap tertentu terhadap masalah seperti ketidakadilan, pengingkaran hak, dan pengabaian hukum. Seorang aktivis biasanya berusaha untuk mendorong orang-orang yang terpinggirkan untuk bersatu dan melawan sistem kekuasaan yang ada. Negosiasi, konfrontasi (seperti melakukan intimidasi), dan konflik adalah tiga strategi yang dapat mereka gunakan. Seorang aktivis juga memiliki peran sebagai partisipan, atau pengacara. Mereka mengambil tindakan ini setelah mereka menyadari bahwa badan pemerintahan atau sistem politik saat itu telah merugikan pelanggan mereka.

2.2.6 Definisi Intervensi Pekerja Sosial

Intervensi pekerja sosial dapat didefinisikan sebagai proses profesional yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu klien dalam menghadapi, mengurangi, atau menyelesaikan permasalahan sosial melalui penerapan metode dan teknik pekerjaan sosial yang sesuai (Zastrow, 2017). Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas klien agar mampu berfungsi secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dubois dan Miley (2014), intervensi pekerja sosial dilaksanakan berdasarkan nilai, prinsip, dan etika pekerjaan sosial, dengan menempatkan klien sebagai subjek yang memiliki hak, martabat, dan potensi untuk berkembang. Dalam rehabilitasi sosial lansia terlantar, intervensi pekerja sosial tidak hanya berfokus

pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada penguatan aspek psikososial, peningkatan kemandirian, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia.

Kementerian Sosial Republik Maret (2018) menyatakan bahwa rehabilitasi sosial lansia bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan lansia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Oleh karena itu, intervensi pekerja sosial di rumah singgah menjadi bagian integral dalam strategi rehabilitasi sosial lansia terlantar.

2.2.7 Intervensi Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar

Intervensi pekerja sosial merupakan rangkaian tindakan profesional yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas dalam mengatasi permasalahan sosial serta meningkatkan keberfungsian sosial (Zastrow, 2017). Dalam konteks rehabilitasi sosial lansia terlantar, intervensi pekerja sosial diarahkan pada upaya pemulihan kemampuan lansia agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal sesuai dengan kondisi fisik, psikologis, dan sosial yang dimiliki.

Adi (2013), intervensi dalam pekerjaan sosial tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, tetapi juga pada penguatan potensi dan sumber daya klien. Lansia terlantar sering kali mengalami penurunan fungsi sosial akibat keterbatasan ekonomi, kesehatan, serta keterputusan hubungan dengan keluarga dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, intervensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial lansia terlantar menjadi penting untuk membantu lansia mencapai kondisi keberfungsian sosial yang lebih baik.

Setting rumah singgah, intervensi pekerja sosial dilaksanakan melalui berbagai tahapan, mulai dari asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, hingga evaluasi dan terminasi (Skidmore, Thackeray, & Farley, 2012). Intervensi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek holistik, mencakup kebutuhan fisik, psikologis, sosial, serta lingkungan lansia. Dengan demikian, pekerja sosial berperan sebagai pendamping profesional, fasilitator, dan penghubung antara lansia terlantar dengan sistem sumber yang tersedia.

2.2.8 Tahapan Intervensi Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar

Intervensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial lansia terlantar dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan berkesinambungan. Tahapan ini bertujuan agar proses pertolongan berjalan secara profesional, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan klien. Menurut Skidmore, Thackeray, dan Farley (2012), tahapan intervensi pekerjaan sosial meliputi asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan terminasi.

Tahap asesmen merupakan langkah awal yang dilakukan pekerja sosial untuk memahami kondisi, kebutuhan, permasalahan, serta potensi yang dimiliki lansia terlantar. Asesmen dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan (Zastrow, 2017). Dalam konteks rumah singgah, asesmen menjadi dasar penting untuk menentukan bentuk rehabilitasi sosial yang tepat bagi lansia.

Tahap perencanaan intervensi dilakukan berdasarkan hasil asesmen. Pekerja sosial menyusun rencana pelayanan rehabilitasi sosial dengan menetapkan tujuan, strategi, serta sumber daya yang akan digunakan. Menurut Dubois dan Miley (2014), perencanaan intervensi harus melibatkan klien secara aktif agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan klien.

Tahap pelaksanaan intervensi merupakan proses pemberian layanan rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, pekerja sosial melakukan pendampingan, konseling, fasilitasi layanan sosial, serta koordinasi dengan pihak terkait. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan, serta terminasi apabila tujuan intervensi telah tercapai atau klien dirujuk ke layanan lanjutan (Skidmore et al., 2012).

2.2.9 Bentuk-bentuk Intervensi Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar

Bentuk intervensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial lansia terlantar dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sesuai dengan kebutuhan klien. Menurut Zastrow (2017), intervensi pekerjaan sosial dapat berupa intervensi langsung (direct practice) dan intervensi tidak langsung (indirect practice).

Intervensi langsung meliputi kegiatan pendampingan individual (casework), konseling psikososial, serta pemberian motivasi dan dukungan emosional kepada lansia terlantar. Intervensi ini bertujuan untuk membantu lansia

mengatasi permasalahan pribadi, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat kemampuan adaptasi sosial.

Intervensi tidak langsung dilakukan melalui koordinasi dan rujukan layanan, seperti layanan kesehatan, bantuan sosial, serta penyaluran ke lembaga pelayanan sosial lanjutan. Menurut Kementerian Sosial Republik Maret (2018), rehabilitasi sosial lansia terlantar juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan sosial, dan penguatan peran sosial lansia dalam lingkungan yang sesuai dengan kondisinya.

2.2.10 Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar di Rumah Singgah

Pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial lansia terlantar di rumah singgah. Menurut Adi (2013), pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, pendamping, mediator, dan advokat dalam membantu klien mengakses pelayanan sosial yang dibutuhkan.

Peran fasilitator, pekerja sosial membantu lansia memperoleh layanan yang tersedia di rumah singgah. Sebagai pendamping, pekerja sosial memberikan dukungan psikososial selama proses rehabilitasi berlangsung. Sebagai mediator, pekerja sosial menjembatani hubungan antara lansia dengan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pelayanan sosial lainnya. Selain itu, pekerja sosial juga berperan sebagai advokat dalam melindungi hak-hak lansia terlantar agar memperoleh pelayanan yang layak.

Peran tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai dan etika pekerjaan sosial, seperti penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan profesionalitas (Dubois & Miley, 2014).

2.2.11 Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Intervensi Pekerja Sosial terhadap Lansia Terlantar

Pelaksanaan intervensi rehabilitasi sosial lansia terlantar, pekerja sosial menghadapi berbagai faktor pendukung dan hambatan. Faktor pendukung antara lain ketersediaan fasilitas rumah singgah, dukungan kebijakan pemerintah, kerja sama lintas sektor, serta kompetensi pekerja sosial (Kementerian Sosial RI, 2018).

Hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas intervensi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kondisi kesehatan lansia yang menurun, minimnya dukungan keluarga, serta stigma sosial terhadap lansia terlantar. Menurut Zastrow (2017), hambatan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat agar pekerja sosial dapat menyesuaikan strategi intervensi yang dilakukan.

2.2.12 Keberfungsian Sosial

Fokus utama pekerjaan sosial menurut Bartlett (1970) adalah keberfungsian sosial. Menurut Bartlett, keberfungsian sosial adalah kemampuan untuk mengatasi (coping) tuntutan (demands) lingkungan yang merupakan tugas kehidupan. Pekerjaan sosial membantu menyeimbangkan tuntutan lingkungan dengan kemampuan individu untuk mengatasinya jika tidak ada keseimbangan antara keduanya dalam kehidupan yang baik dan normal. Dalam kasus di mana tuntutan lingkungan melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya, pekerjaan sosial membantu menyeimbangkan keduanya

Keberfungsian sosial, menurut Achlis (dalam Banfatin, 2017), didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas dan pengaruhnya saat berinteraksi dalam konteks sosial yang dimaksudkan untuk mewujudkan nilai seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka .

2.3 Tinjauan Konseptual tentang Strategi

2.3.1 Definisi Strategi

Kata Strategi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi dalam bahasa Yunani disebut *strategos* yang memiliki arti upaya untuk meraih kemenangan di medan pertempuran, dimana istilah ini pada mulanya memang hanya digunakan di lingkungan militer, akan tetapi istilah tersebut kini juga dipakai pada berbagai bidang yang memiliki esensi yang serupa.

Stephanie K Marrus mengartikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Alfred Chandler sebagaimana dikutip oleh Taufiqurokmah, menyatakan bahwa strategi adalah suatu penentuan sasaran dan tujuan dasar jangka panjang dari suatu organisasi (perusahaan) serta pengadopsian seperangkat tindakan serta alokasi sumber-sumber yang perlu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Lingkungan perusahaan, para manager mengartikan strategi sebagai suatu rencana besar yang memiliki orientasi kepada masa depan untuk terjun dan menjalin

persaingan sebagai langkah untuk mencapai sasaran perusahaan. Karena strategi adalah sebuah rencana “Main” suatu perusahaan.

Definisi strategi menurut Hamei dan Prahalad yang terjemahannya sebagai berikut:

"Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi".

Disimpulkan dari beberapa penjelasan mengenai definisi strategi di atas bahwa strategi adalah bentuk upaya yang digunakan untuk menggapai tujuan yang akan dicapai dalam berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau lainnya untuk mengembangkan atau meningkatkan apa yang sedang diusahakan agar tercapai hasil yang maksimal dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki.

2.3.2 Strategi dalam Pelayanan Sosial

Adi Fahrudin (2012) menyatakan bahwa, strategi pelayanan sosial merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatasi berbagai permasalahan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup individu maupun kelompok. Pelayanan sosial harus dirancang berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan penerima manfaat sehingga bentuk pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Strategi pelayanan sosial juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pelayanan, pemberdayaan penerima manfaat agar mampu

meningkatkan keberfungsian sosialnya, serta evaluasi terhadap proses dan hasil pelayanan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. Strategi pelayanan sosial tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada proses pemberdayaan yang mendorong kemandirian penerima manfaat.

Charles Zastrow (2010) menyatakan bahwa, strategi dalam pelayanan sosial merupakan pendekatan yang digunakan oleh pekerja sosial dan lembaga pelayanan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat mencapai keberfungsian sosial yang optimal. Strategi tersebut tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah yang sedang dialami klien, tetapi juga pada upaya meningkatkan kemampuan klien dalam menghadapi permasalahan di masa depan.

Pelayanan sosial dilakukan dengan menghubungkan klien dengan sumber-sumber pelayanan yang tersedia, memperkuat kemampuan pemecahan masalah, serta meningkatkan efektivitas sistem pelayanan sosial agar mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, strategi pelayanan sosial menurut Zastrow menekankan pentingnya intervensi antara intervensi langsung kepada klien dan memperkuat sistem pelayanan sosial sehingga pelayanan yang diberikan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

2.3.3 Strategi dalam Rehabilitasi Sosial

Strategi dalam rehabilitasi sosial merupakan serangkaian pendekatan, metode, dan langkah yang dirancang secara sistematis untuk membantu individu yang mengalami disfungsi sosial agar mampu kembali menjalankan peran sosialnya secara optimal. Strategi tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi

penerima manfaat, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas individu sehingga mampu mandiri, beradaptasi dengan lingkungan, serta mempertahankan keberfungsian sosialnya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penyusunan strategi rehabilitasi sosial harus mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, potensi, serta sumber daya yang dimiliki oleh individu maupun lingkungan sosialnya. (Soeharto, 2014).

Edi Suharto (2014) , rehabilitasi sosial merupakan bagian dari pelayanan kesejahteraan sosial yang bertujuan memulihkan keberfungsian sosial seseorang melalui berbagai bentuk pelayanan yang terencana dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya, strategi rehabilitasi sosial dilakukan dengan mengembangkan potensi individu, memperkuat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan keterampilan sosial, serta membangun dukungan dari keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya ditentukan oleh intervensi yang diberikan kepada individu, tetapi juga oleh keterlibatan lingkungan sosial sebagai sistem pendukung yang membantu proses pemulihan fungsi sosial.

Zastrow (2017), menjelaskan bahwa strategi dalam praktik pekerjaan sosial harus didasarkan pada proses intervensi yang sistematis, dimulai dari pengenalan masalah, asesmen kebutuhan, perencanaan intervensi, pelaksanaan layanan, evaluasi, hingga terminasi. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan sehingga pekerja sosial dapat menentukan bentuk pelayanan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan klien. Melalui strategi yang terencana tersebut, rehabilitasi sosial tidak hanya fokus pada pemulihan kondisi individu, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan klien dalam menjalankan fungsi sosial, membangun hubungan sosial yang sehat, serta mencapai kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat.

2.4 Tinjauan Konseptual tentang Rehabilitasi Sosial

2.4.1 Definisi Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pelayanan kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami hambatan atau gangguan dalam menjalankan fungsi sosialnya agar dapat kembali berperan secara wajar di dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial tidak bersifat karitatif semata, melainkan berorientasi pada pemulihan dan penguatan kapasitas individu melalui pendampingan yang terencana dan berkelanjutan.

Rehabilitasi sosial menurut Charles Zastrow adalah proses profesional yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan individu, kelompok, atau masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosial mereka. Tujuannya adalah agar mereka dapat kembali mandiri dan berpartisipasi wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa, rehabilitasi sosial adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal (Kemensos RI, 2018). Definisi ini menegaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses yang menempatkan individu sebagai subjek yang memiliki potensi untuk diberdayakan.

Soetomo dalam buku *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* menyatakan bahwa , penanganan masalah sosial melalui pendekatan rehabilitatif didasarkan pada pandangan bahwa setiap penyandang masalah sosial memiliki potensi untuk berubah dan berkembang menuju kondisi yang lebih baik.

Potensi tersebut terdapat pada tingkat individu, kelompok, maupun masyarakat. Dalam konteks rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar, pandangan ini menunjukkan bahwa lansia yang mengalami keterlantaran tetap memiliki kemampuan dan potensi untuk melihat keberfungsian sosialnya melalui berbagai intervensi yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, serta perlindungan dan hak sosial. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial diarahkan untuk membantu lansia memperoleh kembali kemampuan menjalankan peran sosialnya dan meningkatkan kualitas hidup di lingkungan masyarakat.

Perspektif pekerjaan sosial, rehabilitasi sosial dipahami sebagai bentuk intervensi profesional yang mencakup berbagai aspek kehidupan individu, termasuk aspek fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Rehabilitasi sosial tidak hanya bertujuan mengurangi dampak permasalahan sosial, tetapi juga mendorong individu untuk mencapai kemandirian sosial sesuai dengan kondisi dan kemampuannya (Zastrow, 2017).

2.4.2 Tujuan Rehabilitasi Sosial

Tujuan rehabilitasi sosial secara umum adalah untuk mengembalikan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu agar mampu berinteraksi dan berpartisipasi secara wajar dalam kehidupan sosial. Pada kelompok rentan seperti lanjut usia terlantar,

tujuan rehabilitasi sosial diarahkan tidak hanya pada pemulihan fungsi sosial, tetapi juga pada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar lansia.

Secara khusus, tujuan rehabilitasi sosial meliputi:

1. Membantu individu memenuhi kebutuhan dasar yang layak, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan.
2. Memulihkan kondisi psikososial individu yang mengalami tekanan emosional, kesepian, atau kehilangan peran sosial.
3. Memberikan rasa aman dan perlindungan dari berbagai bentuk penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.
4. Mendorong individu untuk tetap memiliki peran dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
5. Menyiapkan individu untuk proses reintegrasi sosial, baik kembali ke keluarga, masyarakat, maupun ke lembaga pelayanan sosial lanjutan.

Tujuan tersebut sejalan dengan pandangan Suharto (2014) yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial bertujuan untuk memperkuat kapasitas individu agar mampu menghadapi permasalahan sosial secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, rehabilitasi sosial tidak hanya berorientasi pada pemecahan masalah jangka pendek, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup individu dalam jangka panjang.

2.4.3 Bentuk dan Layanan Rehabilitasi Sosial

Bentuk dan layanan rehabilitasi sosial diselenggarakan melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penerima manfaat. Rehabilitasi sosial

dapat dilaksanakan melalui layanan berbasis lembaga maupun layanan berbasis masyarakat yang saling melengkapi.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, layanan rehabilitasi sosial mencakup beberapa bentuk, antara lain:

1. Layanan penampungan dan perlindungan sementara, yang bertujuan memberikan rasa aman bagi individu yang mengalami penelantaran atau situasi darurat sosial.
2. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.
3. Layanan bimbingan sosial dan pendampingan psikososial, untuk membantu individu mengatasi permasalahan emosional dan sosial.
4. Layanan kesehatan dan perawatan dasar, baik secara langsung maupun melalui rujukan ke fasilitas kesehatan.
5. Layanan rujukan dan reintegrasi sosial, yang diarahkan untuk menghubungkan individu dengan keluarga, masyarakat, atau lembaga pelayanan lanjutan.

Konteks rumah singgah, layanan rehabilitasi sosial berfungsi sebagai tahapan awal dalam proses pemulihan sosial. Rumah singgah menjadi ruang transisi yang memungkinkan individu mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta asesmen kebutuhan sebelum ditentukan bentuk pelayanan lanjutan yang paling sesuai. Melalui

layanan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan individu, rehabilitasi sosial diharapkan mampu meningkatkan keberfungsian sosial dan kualitas hidup penerima manfaat secara berkelanjutan.

2.4.4 Prinsip-Prinsip Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan rehabilitasi sosial harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar kesejahteraan sosial agar pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan kondisi penerima manfaat secara menyeluruh. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program rehabilitasi sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti lanjut usia terlantar.

Prinsip pertama adalah prinsip kemanusiaan, yang menempatkan individu sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, dan potensi. Dalam rehabilitasi sosial, lansia tidak diperlakukan sebagai objek bantuan, melainkan sebagai subjek pelayanan yang harus dihormati keberadaannya. Prinsip ini menekankan pentingnya sikap empati, penghargaan, dan perlakuan yang adil terhadap lansia dalam setiap proses pelayanan (Zastrow, 2017).

Prinsip kedua adalah prinsip partisipasi, yaitu keterlibatan aktif penerima manfaat dalam proses rehabilitasi sosial sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Partisipasi lansia dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan sederhana terkait pelayanan, aktivitas harian, maupun perencanaan tindak lanjut. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki, harga diri, serta motivasi lansia dalam mengikuti proses rehabilitasi sosial (Suharto, 2014).

Prinsip ketiga adalah prinsip individualisasi, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki latar belakang, kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, layanan rehabilitasi sosial harus disesuaikan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan masing-masing lansia. Pendekatan individual ini penting agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan keberfungsian sosial (Kemensos RI, 2018).

Prinsip keempat adalah prinsip keberlanjutan, yang mengarahkan rehabilitasi sosial agar tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sementara. Pelayanan rehabilitasi sosial harus dirancang secara berkesinambungan, mulai dari tahap perlindungan, pemulihan, hingga reintegrasi sosial. Dengan prinsip ini, rehabilitasi sosial diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup lansia terlantar.

Prinsip kelima adalah prinsip kolaborasi, yaitu kerja sama antara berbagai pihak dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Pemerintah, pekerja sosial, keluarga, masyarakat, serta lembaga terkait memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung proses rehabilitasi sosial. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan bersifat komprehensif dan berkelanjutan (Suharto, 2014).

Rehabilitasi sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu berjalan secara efektif, humanis, dan berorientasi pada peningkatan keberfungsian sosial penerima manfaat. Prinsip-prinsip rehabilitasi sosial ini juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial di rumah singgah, khususnya dalam penanganan lanjut usia terlantar.

2.4.5 Rehabilitasi Sosial dalam Perspektif Pekerjaan Sosial

Perspektif pekerjaan sosial, rehabilitasi sosial dipandang sebagai suatu proses intervensi profesional yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami permasalahan sosial agar mampu meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pekerjaan sosial menempatkan rehabilitasi sosial tidak hanya sebagai rangkaian layanan teknis, tetapi sebagai proses pendampingan yang berfokus pada relasi profesional, empati, serta penguatan potensi penerima manfaat.

Pekerja sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, khususnya dalam menangani lanjut usia terlantar. Peran tersebut diawali dengan melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi lansia, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, serta lingkungan. Hasil asesmen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas lansia. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Zastrow (2017) yang menegaskan bahwa intervensi pekerjaan sosial harus didasarkan pada pemahaman holistik terhadap klien.

Pekerja sosial berperan sebagai pendamping yang memberikan bimbingan dan dukungan psikososial kepada lansia selama proses rehabilitasi sosial berlangsung. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu lansia mengatasi perasaan kesepian, kehilangan peran sosial, serta tekanan emosional yang sering muncul akibat penelantaran. Melalui hubungan profesional yang empatik dan suportif, pekerja sosial membantu lansia membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri.

Pekerja sosial juga berperan sebagai penghubung antara lansia dengan berbagai sumber pelayanan sosial yang tersedia. Dalam konteks rumah singgah, pekerja

sosial melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan, keluarga, masyarakat, serta lembaga pelayanan sosial lainnya untuk memastikan lansia memperoleh layanan yang sesuai dan berkelanjutan. Peran ini dikenal sebagai peran broker dan advokat, di mana pekerja sosial memastikan hak-hak lansia terpenuhi serta mendorong akses terhadap layanan yang dibutuhkan (Suharto, 2014).

Pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial juga menekankan pentingnya pemberdayaan lansia, meskipun dalam batas kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui keterlibatan lansia dalam aktivitas sederhana, pengambilan keputusan terkait kehidupan sehari-hari, serta penguatan relasi sosial dengan lingkungan sekitar. Pendekatan pemberdayaan bertujuan agar lansia tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan, melainkan tetap merasa memiliki peran dan nilai dalam kehidupannya.

Rehabilitasi sosial dalam perspektif pekerjaan sosial merupakan proses yang terstruktur, humanis, dan berorientasi pada keberfungsian sosial. Melalui peran profesional pekerja sosial, rehabilitasi sosial diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi lanjut usia terlantar, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial mereka.

2.5 Tinjauan Konseptual tentang Pelayanan Sosial

2.5.1 Definisi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial lebih ditekankan pada individu atau kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan. Secara umum pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengalokasi, dan mendistribusi sumberdaya sosial kepada publik. Sumberdaya sosial mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang dibutuhkan

oleh baik individu maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan (Damanik, 2011).

Pelayanan sosial, juga dikenal sebagai "layanan sosial", adalah program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan sosial dapat ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, atau komunitas secara keseluruhan (Adi Fahrudin, 2015).

Krisman Gea dkk (2024) memberikan pengertian pelayanan sosial menurut Permensos No. 19 (2012), yaitu, Program pelayanan sosial merupakan sebuah usaha yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada lansia agar dapat memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka program pelayanan sosial memiliki peran sebagai tindakan yang membantu lansia menjadi pulih dari setiap masalah yang dihadapi, terpenuhinya kebutuhan, dan berfungsi sosial kembali.

Pengertian lain mengenai pelayanan sosial menurut Spicker (1995), yaitu, Lima kategori utama layanan sosial adalah jaminan sosial, perumahan, kesehatan, pekerjaan sosial, dan pendidikan. Lima kategori tersebut merupakan pelayanan sosial yang bersifat umum. Serupa dengan hal ini, Kahn dan Kamerman (1976) mengidentifikasi lima pelayanan sosial yang mendasar: kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, jaminan sosial, dan perumahan. Layanan sosial pribadi, biasanya disebut sebagai layanan sosial umum, adalah sistem keenam yang muncul, menurut Kahn dan Kamerman. Menurut Spicker, kelima layanan sosial tersebut terkadang diperluas untuk mencakup fungsi tambahan

seperti mencari pekerjaan, memberikan bimbingan, dan menegakkan ketertiban. Menurut Spicker, istilah pelayanan sosial digunakan secara tidak konsisten dan berbeda-beda di setiap negara (Fahrudin 2014: 49-50).

2.5.2 Tujuan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu secara umum memiliki 2 tujuan yaitu; Pertama adalah agar masalah-masalah yang dihadapi oleh individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau masyarakat dapat diatasi atau paling tidak dapat dikurangi (reduction of problem), Kedua adalah agar standar kualitas hidup individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan (to enhanced of qualities of life) dari kualitas hidup sebelumnya yang berada dalam kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang baik (Tuwu, 2023).

2.5.3 Bidang – bidang Pelayanan Sosial

Fahrudin (2014) mengidentifikasi berbagai bidang pelayanan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, antara lain:

1. Kesejahteraan anak dan keluarga.
2. Kesejahteraan remaja dan generasi muda.
3. Kesejahteraan orang lanjut usia.
4. Pelayanan kesejahteraan sosial umum (*public social welfare services*).
5. Pelayanan rekreasional.
6. Pelayanan sosial koreksional.

7. Pelayanan kesehatan mental.
8. Pelayanan sosial medis.
9. Pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.
10. Pelayanan sosial bagi wanita.
11. Pelayanan sosial perumahan dan lingkungan.

2.5.4 Pelayanan Sosial Berbasis Rumah Singgah

Pelayanan sosial berbasis rumah singgah merupakan salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan sosial yang bersifat sementara, non-institusional permanen, dan fleksibel, yang ditujukan bagi individu atau kelompok rentan, termasuk lansia terlantar, yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan fungsi sosial. Berbeda dengan pelayanan berbasis panti, rumah singgah tidak dimaksudkan sebagai tempat tinggal jangka panjang, melainkan sebagai tempat transit dan rehabilitasi awal sebelum klien memperoleh penanganan lanjutan.

Konteks lansia terlantar, rumah singgah berperan sebagai wadah untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal sementara, makanan, layanan kesehatan dasar, serta pendampingan psikososial. Pelayanan ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi fisik, mental, dan sosial lansia sebelum dilakukan rujukan ke layanan yang lebih sesuai, seperti panti sosial lansia, keluarga, atau layanan berbasis komunitas.

Pekerja sosial memiliki peran strategis dalam pelayanan sosial berbasis rumah singgah, khususnya dalam pelaksanaan asesmen, perencanaan intervensi,

pelaksanaan rehabilitasi sosial, serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan klien. Intervensi yang dilakukan pekerja sosial menekankan pendekatan casework, dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan permasalahan unik yang dialami oleh setiap lansia terlantar.

Pelayanan sosial berbasis rumah singgah menjadi bagian penting dalam sistem rehabilitasi sosial lansia terlantar, karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara, tetapi juga sebagai sarana intervensi profesional pekerja sosial dalam membantu lansia mencapai keberfungsian sosial yang optimal.

2.6 Tinjauan Konseptual tentang Lansia Terlantar

Lansia terlantar adalah lanjut usia yang berada dalam kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak akibat keterbatasan ekonomi, lemahnya dukungan keluarga, serta minimnya akses terhadap pelayanan sosial. Menurut Kementerian Sosial Republik Maret, lansia terlantar merupakan lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memperoleh perhatian yang memadai dari keluarga maupun lingkungan sosialnya (Kemensos RI, 2022).

2.6.1 Klasifikasi Lanjut Usia

Siti Rachmah (2022: 2) memberikan penjelasan mengenai klasifikasi lanjut usia menurut *World Health Organization* (WHO, 2013), yaitu:

1. Usia pertengahan (*middle age*), tepatnya populasi yang berusia 45 hingga 54 tahun.

2. Lanjut usia (*elderly*), tepatnya populasi yang berusia 55 hingga 65 tahun.
3. Lanjut usia muda (*young old*), tepatnya populasi yang berusia 66 hingga 74 tahun.
4. Lanjut usia tua (*old*), tepatnya populasi yang berusia 75 hingga 90 tahun.
5. Lanjut usia sangat tua (*very old*), tepatnya populasi yang berusia 91 atau lebih.

Siti Rachmah (2022: 2) memberikan penjelasan tambahan mengenai klasifikasi lanjut usia menurut Depkes RI (2013), yaitu:

1. Pra lanjut usia, yaitu individu yang berusia 45 hingga 59 tahun.
2. Lanjut usia, yaitu individu yang berusia 60 tahun atau lebih.
3. Lanjut usia resiko tinggi, yaitu individu yang berusia 60 tahun atau lebih yang memiliki masalah kesehatan.
4. Lanjut usia potensial, yaitu lansia yang masih mampu untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa.
5. Lanjut usia tidak potensial, yaitu lansia yang tidak dapat mencari nafkah dan harus bergantung pada bantuan orang lain untuk hidup.

2.6.2 Ciri-ciri Lanjut Usia

Zaskya Rahmadani dkk (2024) memberikan beberapa penjelasan mengenai ciri-ciri lanjut usia menurut Hurlock (1980), antara lain:

1. Usia lanjut merupakan penurunan kualitas hidup

Tahap usia lanjut ketika terjadi penurunan fisik dan mental yang progresif. Kombinasi faktor psikologis dan fisik berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Daripada penyakit tertentu, perubahan dalam sel-sel tubuh adalah alasan fisik dari kemunduran. Faktor psikologis juga dapat berkontribusi terhadap kemunduran.

2. Perbedaan individual pada efek menua

Faktor pola hidup, latar belakang keuangan dan pendidikan, serta karakteristik alamiah yang berbeda-beda, setiap orang menua dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan orang merespons secara berbeda terhadap keadaan yang sama seiring bertambahnya usia.

3. Sikap sosial terhadap lanjut usia

Pandangan sosial secara signifikan dipengaruhi oleh ide-ide klise tentang usia lanjut. Pentingnya cara kita memperlakukan orang yang lebih tua dipengaruhi oleh pemikiran kita tentang penuaan.

4. Lansia dianggap sebagai kategori minoritas.

Lanjut usia hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki otoritas karena mereka adalah kelompok minoritas, yang dalam beberapa hal menghalangi mereka

untuk berinteraksi dengan kelompok lain, meskipun jumlah mereka terus bertambah.

2.6.3 Faktor Penyebab Lansia Terlantar

Kondisi lansia terlantar dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya keterbatasan ekonomi yang berkepanjangan, renggangnya hubungan keluarga, serta menurunnya kondisi kesehatan fisik dan mental. Selain itu, perubahan struktur keluarga dan rendahnya kepedulian sosial masyarakat turut memperbesar risiko lansia mengalami keterlantaran (Huraerah, 2019).

Huraerah (2019) menjelaskan bahwa kemiskinan struktural menjadi penyebab dominan yang mendorong lansia berada dalam kondisi rentan dan terabaikan.

Selain faktor ekonomi, renggangnya hubungan keluarga juga menjadi penyebab penting terjadinya keterlantaran lansia. Perubahan nilai dan dinamika keluarga, seperti meningkatnya mobilitas kerja, urbanisasi, serta berkurangnya fungsi keluarga sebagai sistem pendukung utama, menyebabkan lansia kehilangan peran dan perhatian dalam lingkungan keluarga. Menurut Suharto (2014), melemahnya ikatan emosional dan tanggung jawab keluarga terhadap lansia sering kali berujung pada pengabaian, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Faktor lainnya adalah penurunan kondisi kesehatan fisik dan mental yang dialami lansia. Proses penuaan secara alami menyebabkan menurunnya kemampuan fisik, meningkatnya risiko penyakit kronis, serta gangguan mental seperti depresi dan demensia. Kondisi ini membuat lansia semakin bergantung pada

bantuan orang lain dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Apabila keluarga atau lingkungan sekitar tidak mampu atau tidak mau memberikan dukungan, maka lansia berpotensi mengalami keterlantaran (Maryam et al., 2012).

Perubahan struktur keluarga dan rendahnya kepedulian sosial masyarakat turut memperbesar risiko keterlantaran lansia. Pergeseran dari keluarga besar ke keluarga inti menyebabkan berkurangnya jumlah anggota keluarga yang dapat merawat lansia. Di sisi lain, lemahnya solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat dalam melindungi kelompok rentan membuat lansia semakin terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Huraerah (2019) menegaskan bahwa keterlantaran lansia tidak hanya merupakan masalah individu atau keluarga, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem perlindungan sosial di masyarakat.

2.6.4 Dampak Lansia Terlantar

Keterlantaran pada lansia menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara fisik maupun psikososial. Lansia berisiko mengalami penurunan kualitas hidup, meningkatnya gangguan kesehatan, serta munculnya perasaan terisolasi dan tidak berharga. Kondisi ini juga dapat meningkatkan ketergantungan lansia terhadap bantuan sosial dari pemerintah maupun lembaga sosial (Nugroho, 2018).

2.6.5 Kebutuhan Dasar Lansia Terlantar

Lansia terlantar memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisik seperti pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan, kebutuhan psikologis berupa rasa aman dan penerimaan, kebutuhan sosial untuk tetap berinteraksi, serta

kebutuhan spiritual guna menjaga ketenangan batin. Pemenuhan kebutuhan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan lansia secara menyeluruh (Hidayat, 2020).

2.6.6 Pelayanan Sosial bagi Lansia Terlantar

Pelayanan sosial bagi lansia terlantar merupakan bentuk intervensi yang dirancang secara sistematis untuk membantu lansia memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pelayanan ini meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan sosial dan psikologis, layanan kesehatan dasar, serta upaya reintegrasi sosial dengan keluarga atau masyarakat. Kementerian Sosial Republik Maret menegaskan bahwa pelayanan sosial lansia dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, dan pekerja sosial profesional (Kemensos RI, 2021).

2.6.7 Rehabilitasi Sosial pada Lansia Terlantar

Rehabilitasi sosial pada lansia terlantar merupakan proses pemulihan dan penguatan kemampuan lansia agar mampu berfungsi kembali dalam kehidupan sosial. Program rehabilitasi sosial mencakup bimbingan fisik, mental, sosial, dan kegiatan keterampilan ringan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan lansia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup lansia secara berkelanjutan (Kemensos RI, 2020).

2.7 Penelitian Sebelumnya

2.1 Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Komponen	Keterangan
1.	Nama Penulis	Dyah Adriantini
	Judul Artikel dan Tahun	Borobudur Law and Society Journal Tahun 2025
	Nama Jurnal	Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dalam Rehabilitasi Lansia Terlantar di Luar Panti Sosial
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam rehabilitasi lansia terlantar di luar panti sosial belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala utama, antara lain keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya peran aparat pelaksana, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung rehabilitasi sosial lansia terlantar
	Persamaan	memiliki persamaan dengan penelitian ini pada fokus kajian, yaitu rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama mengkaji pelaksanaan program rehabilitasi sosial dalam kerangka kebijakan pelayanan sosial pemerintah.
	Perbedaan	Perbedaan terletak pada fokus analisis dan lokasi penelitian. Penelitian Dyah Adriantini menitikberatkan pada efektivitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) rehabilitasi sosial lansia terlantar di luar panti sosial secara kebijakan, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses intervensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial lansia terlantar di rumah singgah, dengan penekanan pada praktik profesional pekerja sosial.
	URL	https://doi.org/10.31603/11826
	Nama Penulis	Nina Kurniasih, Willya Achmad, Salma Aulia, Farhan Rifqi

2.	Judul Artikel dan Tahun	Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2025
	Nama Jurnal	PENGUATAN KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL DALAM PROGRAM REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT (RBM) UNTUK LANSIA TERLANTAR DI KELURAHAN CIGADUNG KOTA BANDUNG
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kompetensi pekerja sosial melalui Program RBM memberikan dampak positif terhadap penanganan lansia terlantar. Pelaksanaan tiga strategi utama, yaitu sosialisasi RBM, pendampingan langsung kepada lansia, dan pelatihan peningkatan kompetensi pekerja sosial, terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan sosial yang lebih responsif dan partisipatif. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya peningkatan keterampilan pekerja sosial dalam melakukan asesmen dan pendampingan, meningkatnya kepedulian serta partisipasi masyarakat, terbentuknya kerja sama lintas sektor, serta perubahan sikap sosial masyarakat dari individualistik menjadi lebih solider terhadap lansia di lingkungan sekitar.
	Persamaan	Memiliki persamaan dengan penelitian ini pada penggunaan metode kualitatif serta fokus pada rehabilitasi sosial lansia terlantar. Keduanya menempatkan pekerja sosial sebagai aktor penting dalam proses pendampingan dan pemulihan fungsi sosial lansia.
	Perbedaan	Perbedaan terletak pada konteks dan pendekatan program. Penelitian Nina Kurniasih . menitikberatkan pada penguatan kompetensi pekerja sosial dalam Program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada proses intervensi pekerja sosial di lembaga pelayanan sosial formal berupa rumah singgah.
	URL	https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm/article/view/7174
3.	Nama Penulis	Tiwi Fadillah
	Judul Artikel dan Tahun	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar pada Dinas Sosial di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020
	Nama Jurnal	Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi sosial lansia terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial

		Kabupaten Polewali Mandar meliputi pemberian bantuan kebutuhan dasar seperti sembako dan bantuan tunai, pelayanan kesehatan melalui kerja sama dengan instansi terkait, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan lansia. Namun, pelaksanaan rehabilitasi sosial masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terbatasnya jumlah tenaga pendamping lansia, kurangnya dukungan keluarga terhadap lansia terlantar, serta tingginya kebutuhan layanan yang tidak sebanding dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan sosial lansia terlantar di wilayah tersebut.
	Persamaan	Penelitian Tiwi Fadillah memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam membahas rehabilitasi sosial lansia terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial serta menggunakan metode penelitian kualitatif.
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada wilayah dan fokus kajian. Penelitian Tiwi Fadillah lebih menekankan pada bentuk layanan rehabilitasi sosial dan kendala struktural di tingkat daerah Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses intervensi pekerja sosial secara mendalam di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung.
	URL	https://www.academia.edu/download/92728666/426740072.pdf
4.	Nama Penulis	M. Rafli Muhajir, Fajar Utama Ritonga
	Judul Artikel dan Tahun	Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Melalui Program Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2023
	Nama Jurnal	Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan mampu memberikan dampak positif terhadap penanganan gelandangan dan pengemis, termasuk lansia terlantar. Melalui pendekatan group work, penerima manfaat mengalami peningkatan motivasi, perubahan sikap, serta penguatan keterampilan sosial dan ekonomi. Lansia terlantar yang mengikuti program rehabilitasi menunjukkan perbaikan kondisi psikososial, merasa lebih diperhatikan, serta memiliki akses terhadap bantuan sosial dan layanan panti. Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial sangat bergantung

		pada kesadaran individu penerima manfaat dan kesinambungan pendampingan dari pemerintah.
	Persamaan	Penelitian M. Rafli Muhajir dan Fajar Utama Ritonga memiliki persamaan dalam penggunaan pendekatan kualitatif dan kajian rehabilitasi sosial terhadap kelompok rentan, termasuk lansia terlantar.
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada subjek utama penelitian. Penelitian ini berfokus pada lansia terlantar secara khusus, sedangkan penelitian Rafli dan Ritonga mengkaji gelandangan dan pengemis secara umum, dengan lansia sebagai bagian dari kelompok sasaran program.
	URL	https://doi.org/10.58466/literasi.v3i1.1264
5.	Nama Penulis	Denada Indah Silalahi, Nur Afifah
	Judul Artikel dan Tahun	Strategi dalam Menangani Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus: UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara) Tahun 2025
	Nama Jurnal	Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai dalam menangani kesejahteraan lansia terlantar telah berjalan cukup efektif, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan rohani. Namun, efektivitas pelaksanaan strategi masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya jumlah pengasuh, serta ketiadaan tenaga medis tetap. Keterbatasan sumber daya tersebut menyebabkan program pembinaan lanjutan dan pemberdayaan lansia belum dapat dilaksanakan secara optimal, meskipun secara umum layanan dasar telah memberikan dampak positif terhadap rasa aman dan kesejahteraan sosial lansia.
	Persamaan	Penelitian Denada Indah Silalahi dan Nur Afifah memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam mengkaji kesejahteraan lansia terlantar serta peran lembaga pelayanan sosial pemerintah.
	Perbedaan	Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian Denada Indah Silalahi dan Nur Afifah menitikberatkan pada strategi kelembagaan UPTD Pelayanan Sosial Lansia, sedangkan penelitian ini menekankan pada proses intervensi pekerja sosial secara langsung terhadap lansia terlantar di rumah singgah.
	URL	https://doi.org/10.69714/mygqfm69

6.	Nama Penulis	Putri Maharani, Sawi Sujarwo
	Judul Artikel dan Tahun	Meningkatkan Konsep Diri dengan Pemberian Motivasi pada Orang Terlantar di Panti Sosial Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang dengan Gangguan Jiwa (PSR-GPODGJ) Tahun 2023
	Nama Jurnal	Jurnal Pengabdian Mandiri (JPM)
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian, yaitu lansia terlantar, mengalami peningkatan konsep diri setelah mendapatkan intervensi berupa pemberian motivasi individu, meskipun perubahan tersebut belum terlihat secara signifikan. Perubahan ini tampak dari cara pandang lansia terhadap dirinya yang menjadi lebih positif, baik dalam hal gambaran diri maupun persepsi terhadap kemampuan dan keberhargaan dirinya. Pemberian motivasi secara personal terbukti membantu lansia membangun konsep diri yang lebih baik dibandingkan kondisi awal yang cenderung negatif, di mana sebelumnya mereka merasa tidak berdaya, kurang percaya diri, dan kurang memiliki makna dalam kehidupan sosialnya.
	Persamaan	Penelitian Putri Maharani dan Sawi Sujarwo memiliki persamaan dalam pendekatan kualitatif serta fokus pada rehabilitasi psikososial bagi individu terlantar, termasuk lansia.
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada variabel utama. Penelitian Putri Maharani dan Sawi Sujarwo berfokus pada peningkatan konsep diri melalui motivasi individu, sedangkan penelitian ini menekankan proses intervensi pekerja sosial secara komprehensif dalam rehabilitasi sosial lansia terlantar.
	URL	https://mail.bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/6421
7.	Nama Penulis	Maria Theresia Paba Achluddin Ibnu Rochim Radjikan
	Judul Artikel dan Tahun	Implementasi Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Lanjut Usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2025
	Nama Jurnal	PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
	Metode	Kualitatif

8.	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi lanjut usia di Kabupaten Ngada pada dasarnya telah berjalan, namun pelaksanaannya belum optimal. Meskipun program tersebut memiliki tujuan kebijakan yang jelas, pemahaman lansia sebagai kelompok sasaran terhadap program masih terbatas, sehingga pemanfaatannya belum maksimal. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala utama, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, keterlambatan penyaluran bantuan, lemahnya komunikasi kepada masyarakat sasaran, serta belum adanya regulasi daerah khusus yang mengatur perlindungan dan pelayanan bagi lansia. Selain itu, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan geografis Kabupaten Ngada juga turut mempengaruhi efektivitas implementasi program rehabilitasi sosial tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, namun tetap memerlukan penguatan sumber daya, perbaikan komunikasi, serta pengembangan kebijakan daerah agar pelaksanaan rehabilitasi sosial lansia dapat berjalan lebih efektif dan merata.
	Persamaan	Penelitian Maria Theresia Paba. memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam membahas implementasi program rehabilitasi sosial bagi lansia serta menggunakan metode kualitatif.
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada pendekatan kajian. Penelitian ini menekankan praktik intervensi pekerja sosial, sedangkan penelitian Maria Theresia Paba dkk. lebih berfokus pada implementasi kebijakan dan administrasi publik dalam rehabilitasi PMKS lansia.
	URL	https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/2543
	Nama Penulis	Arifah Ulayya Rangga Wijaya Rio Riswanto Simanjuntak Ezra Azzahra Aleeka Jasmine Hairani
8.	Judul Artikel dan Tahun	Efektivitas Manajemen Pelayanan Sosial dalam Penanganan Lansia Terlantar di Kota Medan. Tahun 2025
	Nama Jurnal	Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan
	Metode	Kualitatif

	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan sosial dalam penanganan lansia terlantar di Kota Medan belum berjalan sepenuhnya efektif. Pada tahap perencanaan, masih ditemukan keterbatasan dalam proses pendataan dan pemetaan lansia terlantar sehingga program belum sepenuhnya berbasis kebutuhan yang akurat. Dari aspek pengorganisasian, koordinasi antar instansi terkait masih lemah, yang berdampak pada kurang optimalnya sinergi dalam pelaksanaan layanan sosial. Pada tahap implementasi, program juga menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran serta kurangnya sumber daya manusia yang profesional di bidang pelayanan lansia. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal karena masih berfokus pada indikator kuantitatif dan belum menggambarkan perubahan kualitas kesejahteraan lansia secara menyeluruh.
	Persamaan	Penelitian Arifah Ulayya dkk. memiliki persamaan dalam fokus pada penanganan lansia terlantar oleh pemerintah daerah serta penggunaan metode kualitatif.
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada sudut pandang penelitian. Penelitian Arifah Ulayya dkk. menitikberatkan pada manajemen pelayanan sosial, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada proses intervensi pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial lansia terlantar
	URL	https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i2.5608
	Nama Penulis	Farhan Lutfi Azidan Riki Riundi Islami Nikodemus Niko
9.	Judul Artikel dan Tahun	Pemberdayaan Lansia Terlantar di Rumah Bahagia Embung Fatimah Kota Tanjungpinang. Tahun 2023
	Nama Jurnal	Regalia: Jurnal Gender
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan lansia terlantar di Rumah Bahagia Embung Fatimah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup lansia, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Bentuk pemberdayaan yang diberikan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan, pelayanan kesehatan melalui kerja sama dengan puskesmas setempat, serta pendampingan dan pengawasan rutin oleh petugas piket. Melalui berbagai bentuk layanan tersebut, lansia merasa lebih diperhatikan,

		dihargai, dan memiliki makna dalam kehidupan sosialnya. Meskipun demikian, pelaksanaan program menghadapi kendala utama berupa keterbatasan kondisi fisik lansia, sehingga tidak semua kegiatan pelatihan keterampilan dapat diikuti secara optimal oleh seluruh penerima manfaat. Secara keseluruhan, Rumah Bahagia Embung Fatimah terbukti berperan penting sebagai lembaga pelayanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga martabat lansia terlantar.
	Persamaan	Penelitian Farhan Lutfi Azidan dkk. memiliki persamaan dalam membahas pemberdayaan dan rehabilitasi sosial lansia terlantar melalui lembaga pelayanan sosial.
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada pendekatan program. Penelitian Farhan Lutfi Azidan dkk. berfokus pada pemberdayaan lansia, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada intervensi pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial secara menyeluruh.
	URL	https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jga/article/view/6395
10.	Nama Penulis	Peranan UPTD Dinas Sosial Provsu Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar Di Kota Binjai
	Judul Artikel dan Tahun	Peranan UPTD Dinas Sosial Provsu Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar Di Kota Binjai Tahun 2025
	Nama Jurnal	Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara telah berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar di Kota Binjai melalui pelaksanaan berbagai program pelayanan sosial. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan panti sosial sebagai tempat tinggal sementara, pemberian bantuan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan secara rutin, serta penyelenggaraan program rehabilitasi sosial dan psikologis dan pemberdayaan lansia. Secara umum, program-program tersebut dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial.
	Persamaan	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam mengkaji peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar melalui rehabilitasi sosial.
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada fokus analisis. Penelitian UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara lebih menekankan

		pada peran kelembagaan dan program pelayanan, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis proses intervensi pekerja sosial di rumah singgah sebagai unit pelayanan rehabilitasi sosial.
	URL	https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/28550

Penelitian yang berjudul Rehabilitasi Sosial bagi Lansia Terlantar: Studi Kasus di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai penelitian sebelumnya yang sama-sama mengkaji isu rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar. Persamaan utama terletak pada fokus kajian yang menempatkan lansia terlantar sebagai kelompok rentan yang memerlukan intervensi kesejahteraan sosial melalui peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial. Seluruh penelitian, baik penelitian ini maupun penelitian terdahulu, menegaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan instrumen penting dalam upaya pemulihan fungsi sosial lansia agar mampu hidup secara lebih layak, bermartabat, dan terintegrasi dengan lingkungan sosialnya.

Pendekatan metodologis, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam realitas sosial yang dialami lansia terlantar serta dinamika pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, baik penelitian ini maupun penelitian terdahulu berupaya memahami proses, pengalaman, serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di lapangan. Kesamaan lainnya juga terlihat pada temuan umum yang menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial lansia terlantar di berbagai daerah belum berjalan secara optimal akibat

keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi keluarga dan masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian. Penelitian ini secara khusus menekankan pada strategi rehabilitasi sosial, yaitu bagaimana tahapan rehabilitasi dilaksanakan secara nyata di rumah singgah, mulai dari asesmen awal, pemberian pelayanan dan pendampingan, hingga proses reintegrasi sosial lansia. Sementara itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas kebijakan, manajemen pelayanan, strategi pelaksanaan program, atau hasil akhir dari rehabilitasi sosial, seperti peningkatan kesejahteraan atau perubahan kondisi psikososial lansia.

Perbedaan juga terlihat pada konteks dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bandung, yang memiliki karakteristik sebagai lembaga layanan sosial non-panti dan bersifat sementara. Kondisi ini berbeda dengan sebagian penelitian sebelumnya yang banyak dilakukan di panti sosial, UPTD, atau melalui program rehabilitasi berbasis masyarakat. Keberadaan rumah singgah sebagai ruang transisi menjadikan proses rehabilitasi sosial lebih dinamis dan menuntut peran aktif pekerja sosial dalam pendampingan intensif, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian terdahulu.

Perbedaan lainnya terletak pada unit analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya melihat program atau kebijakan, tetapi juga menyoroti interaksi antara pekerja sosial, lansia terlantar, dan lingkungan sosial selama proses rehabilitasi

berlangsung. Sebaliknya, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memusatkan perhatian pada aspek struktural dan administratif, seperti implementasi Standar Pelayanan Minimal, strategi kelembagaan, kompetensi pekerja sosial, atau manajemen pelayanan sosial.

Disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki posisi yang melengkapi dan memperkaya kajian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menilai keberhasilan program dan kebijakan rehabilitasi sosial lansia terlantar, maka penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi rehabilitasi sosial itu sendiri dalam konteks rumah singgah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai praktik rehabilitasi sosial lansia terlantar serta menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pekerjaan sosial yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.